

Rapor Biru Pengelolaan Dana Haji

Selain likuid dan aman, dana kelolaan haji ini menghasilkan surplus yang terus meningkat. Wajar saja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Oleh Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Institute

NAIK-NAIK ke puncak gunung. Itulah gambaran pas untuk laporan keuangan pengelolaan dana haji tahun 2020. “*Seluruh indikator keuangan penting, seperti aset, investasi, dana kelolaan, dan nilai manfaat, naik. Kewajiban lancarnya dapat ditopang dengan alat likuiditasnya. Jadi, dana haji sesungguhnya sangat likuid*”.

Bukan hanya likuid, tapi juga relatif paling aman, karena investasinya banyak “ditanam” di instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) – yang dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tidak di instrumen yang penuh risiko seperti di pasar saham, ataupun investasi yang tidak jelas seperti saham-saham “gorengan”.

Menurut laporan keuangan BPKH, per Desember 2020, dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp144,91 triliun, atau meningkat 16,56% dibandingkan dengan 2019 yang tercatat Rp124,32 triliun. Nah, jika dikaitkan dengan target pada 2020, capaian target dana haji adalah 103,83%.

Jika dibedah, alokasi dana haji terkonsentrasi di BPS-BPIH sebesar Rp45,33 triliun (31,3%) dan Rp99,58 triliun (68,7%). Investasi terdistribusi dalam instrumen surat berharga Syariah Rp98,47 triliun, investasi lainnya dalam negeri Rp1,03 triliun, dan investasi luar negeri Rp74 miliar. Menurut laporan keuangan, tidak terdapat investasi langsung di infrastruktur atau proyek-proyek “mangkrak”.

Alhasil, aset total meningkat 16% menjadi Rp145,77 triliun dari periode 2019 yang sebesar Rp125,26 triliun. Peningkatan aset ini dipengaruhi oleh peningkatan investasi jangka panjang. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh aturan (PP Nomor 5 Tahun 2018), selain juga kesempatan meraih imbal hasil yang lebih tinggi, maka pilihan pada investasi jangka panjang.



Anggota V BPK Bahrullah Akbar saat menyerahkan secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Tahun 2020 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V kepada Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu yang digelar di Kantor Pusat BPK, Selasa 29 Juni 2021. (Foto: Dok. BPK)

Aman dan Likuid

Posisi penempatan dana BPS menurun 16,51% menjadi Rp45,33 triliun di 2020 dari Rp54,29 triliun. Posisi penempatan dana memang seharusnya menurun. Itu disebabkan oleh adanya amanat PP Nomor 5 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa komposisi antara penempatan dan investasi setelah tiga tahun BPKH berdiri adalah 30% : 70%. Jadi, harus lebih besar ke investasi – agar memberi nilai manfaat lebih tinggi untuk kesejahteraan calon jemaah haji.

Simak saja. Nilai investasinya terus berkembang dari tahun ke tahun. Tahun 2020 lalu, investasi BPKH menyentuh angka Rp99,58 triliun. Atau, naik tajam sebesar 42,21% dibandingkan dengan posisi 2019 yang sebesar Rp70,02 triliun. Komposisi investasi dari tenor jatuh tempo, tercatat Rp90 triliun jangka panjang dan Rp8,8 triliun jangka pendek.

Strategi itu tentu sudah diperhitungkan, terutama mengenai kebutuhan likuiditas yang meski dominan dalam jangka panjang, kemampuan likuiditasnya memadai. Itu bisa dilihat dari kas, penempatan di bank-bank syariah yang sewaktu-waktu bisa dicairkan. Jadi, pengelolaan dana haji ini tidak hanya aman, tapi juga likuid.

Lebih membanggakan. Nilai manfaat dari investasi dan penempatan juga mendaki. Tahun 2020 lalu total nilai manfaat yang diperoleh mencapai Rp7,43 triliun. Itu terdiri atas nilai manfaat penempatan Rp2,08 triliun (27,99%) dan nilai manfaat dari investasi Rp5,35 triliun (72,01%). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, total nilai manfaat ini terjadi kenaikan Rp67 miliar.

Menurut pandangan analisis, peningkatan nilai manfaat ini adalah sebuah prestasi dalam kondisi krisis

ekonomi akibat pandemi COVID-19. Lihat saja, dibandingkan dengan target 2020, maka kinerja realisasi mencapai 103,9%. Itu artinya pula, pilihan investasi dan penempatan selain mendapat nilai manfaat yang optimal, sekaligus merupakan pilihan strategi yang tepat di tengah pandemi COVID-19.

Di lain sisi – pengelolaan biaya, seperti beban penyelenggaraan, beban operasional BPKH, tampak lebih efisien. Ada penurunan beban penyelenggaraan ibadah haji karena pada 2020 pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan haji akibat pandemi COVID-19. Sejalan dengan itu – meski ada peningkatan beban operasional, seperti beban pegawai, beban penyusutan aset tetap, dan beban amortisasi aset tak berwujud, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan nilai manfaat secara keseluruhan.

Rapor pengelolaan dana haji 2020 – yang dilakukan oleh BPKH – bisa disebut biru atau kinerjanya sangat bagus, baik dari sisi pertumbuhan maupun dari sisi rasio keuangan, seperti rasio likuiditas yang jauh dari cukup. Juga, rasio solvabilitas yang tampak sangat memadai.

Rasio likuiditas wajib – kemampuan BPKH menyediakan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), seperti terlihat dalam laporan keuangan BPKH, tampak lebih dari 2X seperti yang diamanatkan UU Nomor 34 Tahun 2014 – di mana BPKH wajib menjaga 2X BPIH. Jadi, tidaklah benar, BPKH tidak likuid. Justru BPKH sangat likuid.

Hal yang tak kalah pentingnya adalah rasio solvabilitas atau **leverage ratio**. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan BPKH atas pelunasan utang, dan seluruh kewajiban dengan menggunakan jaminan dan aset neto (harta kekayaan dalam bentuk apa pun)

yang dimiliki dalam jangka panjang dan jangka pendek. Rasio solvabilitas BPKH dari tahun ke tahun terus membaik. Jika 2019 sebesar 104%, kini (2020) naik menjadi 108%.

Opini WTP dari BPK

Tak berlebihan – menurut opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas laporan keuangan BPKH, yang terdiri atas Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Neto, dan laporan Realisasi Anggaran, mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Itu artinya akuntabilitas pengelolaan dana haji oleh BPKH ini merupakan yang ketiga kalinya berturut-turut sejak BPKH menyusun laporan keuangan tahun 2018.

Menurut Anggito Abimanyu, Kepala Badan Pelaksana BPKH, bagi BPKH opini WTP atas laporan keuangan BPKH ini merupakan hal yang sangat penting. “Hal ini menjadi bukti akuntabilitas pengelolaan dana haji. Opini WTP ini untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan dana haji yang *prudent*,” kata Anggito.

Selain itu, menurut Anggito, opini WTP ini menjadi bukti bahwa dana haji telah dikelola secara profesional, hati-hati, transparan, dan akuntabel. “Selain itu, opini WTP ketiga kalinya ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji ini aman, dan likuid sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,” Anggito menegaskan.

Tahun 2020, di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, pengelolaan dana haji oleh BPKH, baik dari sisi pertumbuhan, rasio keuangan maupun *governance*, dapat disebut “rapornya biru” atau berkinerja sangat bagus – yang pada akhirnya untuk peningkatan pelayanan calon jemaah haji Indonesia.



IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BPKH 2020 (AUDITED)

Periode Desember 2020

NERACA

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2020 (Audited)	31 Des 2019 (Audited)
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	17.951.687.031	8.884.074.697
Piutang	3.760.391.694	476.908.352.986
Persediaan	335.705.421	-
Beban dibayar dimuka	11.596.596.713	2.900.817.895
Pendapatan yang masih harus diterima	718.547.428.203	352.990.921.417
Penempatan pada bank	45.331.357.490.577	54.298.798.742.530
Investasi jangka pendek	8.861.980.089.784	9.999.505.853.840
Jumlah Aset Lancar	54.945.529.389.423	65.139.988.763.365
Aset Tidak Lancar		
Investasi jangka panjang	90.713.181.900.096	60.018.629.718.359
Aset tetap - bersih	79.614.515.081	91.692.491.343
Aset tak berwujud - bersih	5.400.326.670	7.173.216.678
Kas yang dibatasi penggunaannya	25.000.000.000	-
Aset lain-lain	3.034.335.246	3.034.335.246
Jumlah Aset Tidak Lancar	90.826.231.077.093	60.120.529.761.626
TOTAL ASET	145.771.760.466.516	125.260.518.524.991
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang beban	15.906.723.003	2.988.872.962
Utang jemaah tunda	8.661.589.046.158	101.307.603.701
Utang pajak	699.633.217	399.628.129
Utang lain-lain	126.911.329.168	194.731.737.984
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	8.805.106.731.546	299.427.842.776
Liabilitas Jangka Panjang		
Dana titipan jemaah	125.900.381.376.469	119.746.417.825.215
Pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan	238.078.541.630	238.078.541.630
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	126.138.459.918.099	119.984.496.366.845
JUMLAH LIABILITAS	134.943.566.649.645	120.283.924.209.621
ASET NETO		
Tanpa Pembatasan	1.077.452.330.865	436.607.501.695
Dengan Pembatasan	9.750.741.486.006	4.539.986.813.675
JUMLAH ASET NETO	10.828.193.816.871	4.976.594.315.370
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		
145.771.760.466.516	125.260.518.524.991	

CATATAN

- Penyajian Laporan Keuangan publikasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh BPK yang tertuang dalam laporan Nomor: 37.A/LHP/XVII/05/2021 tanggal 29 Mei 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
- Penyajian laporan keuangan publikasi ini diterbitkan guna memenuhi Pasal 52 ayat 8 Undang-Undang No. 34 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2020 untuk 1 USD = Rp14.105,01 dan untuk 1 SAR = Rp3.758,63.

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2020 (Audited)	31 Des 2019 (Audited)
ASET NETO TANPA PEMBATASAN		
Saldo awal	-	-
Surplus/(Defisit) tahun berjalan	-	-
Saldo Akhir	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain		
Saldo awal	436.607.501.695	181.187.449.179
Koreksi saldo awal aset neto	(14.669.433.906)	-
Penghasilan/(Beban) komprehensif tahun berjalan	655.514.263.076	255.420.052.516
Koreksi aset neto tidak terikat	-	-
Saldo Akhir	1.077.452.330.865	436.607.501.695
Total Aset Neto Tanpa Pembatasan	1.077.452.330.865	436.607.501.695
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN		
Dana BPIH		
Saldo awal	956.415.439.807	691.317.873.522
Koreksi aset neto	85.970.168.063	(332.834.627.837)
Pelimpahan Aset Neto PKOH Kementerian Agama	-	271.456.541.329
Surplus tahun berjalan	5.027.016.540.962	326.475.652.793
Saldo Akhir	6.069.402.148.832	956.415.439.807
Dana Abadi Umat		
Saldo awal	3.583.571.373.868	3.516.358.168.558
Koreksi aset neto	188.344.300	-
Surplus tahun berjalan	97.579.619.006	67.213.205.310
Saldo Akhir	3.681.339.337.174	3.583.571.373.868
Total Aset Neto Dengan Pembatasan	9.750.741.486.006	4.539.986.813.675
TOTAL ASET NETO	10.828.193.816.871	4.976.594.315.370

LAPORAN OPERASIONAL

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2020 (Audited)	31 Des 2019 (Audited)
Pendapatan setoran jemaah berangkat		
-	-	7.637.011.282.453
Beban Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama		
(17.945.975.432)	(17.945.975.432)	(14.454.013.708.606)
Surplus/(Defisit) BPIH	(17.945.975.432)	(6.817.002.426.153)
Pendapatan nilai manfaat Dana PIH		
7.204.350.191.164	7.204.350.191.164	7.142.582.319.121
Penyaluran untuk rekening virtual	(2.000.000.000.000)	(1.083.000.000.000)
Beban operasional BPKH	(159.387.674.770)	(149.992.473.321)
Surplus/(Defisit) Dana PIH	5.044.962.516.394	5.909.589.845.800
Pendapatan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU)		
229.223.554.228	229.223.554.228	223.753.032.351
Penyaluran program kemasyarakatan	(131.643.935.222)	(156.539.827.041)
Surplus/(Defisit) DAU	97.579.619.006	67.213.205.310
Akumulasi Surplus/(Defisit)		
5.124.596.159.968	5.124.596.159.968	(840.199.375.043)
Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya	-	1.233.888.233.146
Total Surplus/(Defisit)	5.124.596.159.968	393.688.858.103
Penghasilan/(Beban) komprehensif lain		
655.514.263.076	655.514.263.076	255.420.052.516
Total Surplus Komprehensif	5.780.110.423.044	649.108.910.619

LAPORAN ARUS KAS

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2020 (Audited)	31 Des 2019 (Audited)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan nilai manfaat	8.440.138.021.804	9.055.200.467.479
Penerimaan operasional efisiensi haji 1440 H/2019 M	153.654.619.177	166.014.280.841
Penerimaan dana jemaah tidak berangkat 1440 H/2019 M	47.616.716.134	44.189.072.875
Penerimaan piutang	277.386.674.644	-
Penerimaan lain-lain	84.565.234.113	99.026.643.785
Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari nilai manfaat	(7.194.288.838)	(7.296.919.625.863)
Pengeluaran beban pajak nilai manfaat	(1.090.265.572.506)	(1.454.742.430.460)
Pengeluaran operasional BPKH	(159.544.899.250)	(164.095.943.929)
Pengeluaran kegiatan untuk kemasyarakatan umat Islam	(156.643.935.222)	(156.539.827.041)
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi	7.589.712.570.056	292.132.637.687
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Pembelian aset tetap	(1.541.616.066)	(10.000.103.152)
Pembelian aset tak berwujud	(162.150.000)	(6.787.674.340)
Penempatan (net)	8.959.775.076.981	11.132.716.466.755
Investasi (net)	(29.087.068.266.173)	(23.097.220.175.475)
Wakaf Temporer (CWLS)	(25.000.000.000)	-
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Investasi	(20.153.996.955.258)	(11.981.291.486.212)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan setoran jemaah	13.650.770.326.446	22.560.571.288.793
Pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji dari setoran jemaah	-	(7.637.011.282.453)
Pengeluaran untuk pengembalian dan pembatalan BPIH	(1.077.418.328.910)	(3.097.032.640.779)
Pengeluaran nilai manfaat yang ditangguhkan	-	(150.888.233.146)
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	12.573.351.997.536	11.675.639.132.415
Kenaikan (penurunan) Kas dan Setara Kas		
9.067.612.334	9.067.612.334	(13.519.716.110)
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	8.884.074.697	22.403.790.807
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Desember 2020	17.951.687.031	8.884.074.697

DEWAN PENGAWAS

- Ketua : Dr. Yuslam Fauzi, SE, MBA
- Anggota : Khasan Faozi, SE, M.Si
- Anggota : Moh. Hatta, Ak., MBA
- Anggota : Dr. KH Marsyudi Syuhud
- Anggota : Ir. Suhaji Lestidi, ME
- Anggota : Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA, CA, Ak
- Anggota : Dr. Abd Hamid Paddu, MA

BADAN PELAKSANA

- Kepala : Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc
- Anggota : Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si
- Anggota : Dr. Beny Witjaksono, SE, MM
- Anggota : A. Iskandar Zulkarnain, SE, MM
- Anggota : Ir. Arjar Susanto Broto, MM
- Anggota : Dr. Rahmat Hidayat, SE, MT
- Anggota : Dr. Hurriyah El Islamy, LLB (hons), M.CL., Ph.D



ISO 9001:2015



ISO 37001:2016

Jakarta, 5 Juli 2021
S. E. & O
Badan Pelaksana

BADAN PENGELOLA KEUANGAN Haji

Anggito Abimanyu
Kepala Badan Pelaksana

Acep Riana Jayaprawira
Anggota Badan Pelaksana